

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

IK : Nilai SAKIP

IK : Indeks Pelayanan Publik

IK : Indeks Kualitas Kebijakan

IK : Indeks Reformasi Hukum

IK : Indeks Tata Kelola Pengadaan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

IK: Persentase Validitas Data Kinerja Pemerintahan

KINERJA
URUSAN

KINERJA
TAKTIKAL

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah

IK 1 : Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A

IK 2: Indeks Kematangan Organisasi

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan

IK 1: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

IK 2: Persentase Fasilitas tata kelola Desa/Kelurahan

IK 3 : Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

IK 1: Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal BAIK

IK 2: Persentase unit pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Baik

KINERJA
TAKTIKAL

Meningkatnya kinerja perangkat Daerah

IK : Rata-rata Nilai SAKIP PD Komponen pelaporan

IK : Persentase PD dengan nilai evaluasi kelembagaan minimal tinggi

IK : Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

IK : Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Standar

Meningkatnya tatakelola Pemerintahan Kelurahan

IK : Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang

Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

IK : Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

IK : Persentase Tindak Lanjut Hasil SKM

IK : Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan Pelayanan Publik

IK : Persentase PD yang melaksanakan dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman

KINERJA
OPERASIONAL

Terlaksananya Penyusunan Dokumen SAKIP dan RB

IK : Jumlah Dokumen SAKIP dan RB Perangkat Daerah

IK : Jumlah Dokumen SAKIP dan RB Pemerintah Daerah

Tersusunnya Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB

IK : Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan ANJAB

Terlaksananya Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

IK : Jumlah PD yang melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Terlaksananya Inventarisasi dan Verifikasi Data Pemerintahan Daerah

IK : Jumlah Data Pemerintahan yang diinventarisasi dan diverifikasi

Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Fasilitas Evaluasi perkembangan Kelurahan

IK : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

IK : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibina

Terlaksananya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam RT SAE

IK : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terlibat dalam RT SAE

Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan

IK : Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

IK : Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik

IK : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Pelayanan

IK : Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah
IK: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan dan Kerjasama Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
IK: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat
IK: Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti

Terlaksananya Penetapan Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan
IK: Jumlah Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan

Terlaksananya Penetapan Kebijakan Bidang Keagamaan
IK: Jumlah Kebijakan Bidang Keagamaan yang ditetapkan

Terlaksananya Penetapan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
IK: Jumlah Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian
IK: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian

Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian
IK: Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti

Terlaksananya Penetapan Kebijakan Bidang Perekonomian
IK: Jumlah Bidang Kebijakan Perekonomian yang ditetapkan

Meningkatnya Kinerja BUMD dan BLUD
IK: Persentase BUMD dalam Kondisi Sehat
IK: Persentase BLUD dalam kondisi minimal Baik

Terlaksananya Pembentukan BLUD
IK: Jumlah BLUD yang dibentuk

Terlaksananya pendirian BUMD
IK: Jumlah BUMD yang didirikan

Terlaksananya Pembinaan BUMD dan BLUD
IK: Jumlah BUMD dan BLUD yang dibina

Terlaksananya Penetapan Kebijakan BUMD dan BLUD
IK: Jumlah Kebijakan BUMD dan BLUD yang ditetapkan

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan
IK: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan

Meningkatnya Monitoring dan Pengendalian Program Pembangunan
IK: Persentase Program Pembangunan yang dimonitoring sesuai dengan ketentuan

Terlaksananya Penyusunan Program Pembangunan
IK: Jumlah Program Pembangunan Daerah yang disusun

Terlaksananya Pengendalian Program Pembangunan
IK: Jumlah Program Pembangunan Daerah yang di monev

Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah
IK: Efektifitas Kerja Sama Daerah

Meningkatnya Sinergitas Antar Daerah
IK: Persentase Kerja sama yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Inventarisasi Kebutuhan Kerja sama Daerah
IK: Jumlah Kerjasama Daerah yang dibutuhkan

Terlaksananya Penyusunan MoU
IK: Jumlah MoU yang tersusun

Terlaksananya Monev Kerja sama Daerah
IK: Jumlah MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama

Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan
IK: Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan

Meningkatnya Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
IK: Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Draft Produk Hukum Daerah
IK: Jumlah Draft Produk Hukum yang difasilitasi

Terlaksananya Penetapan Produk Hukum Daerah
IK: Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan

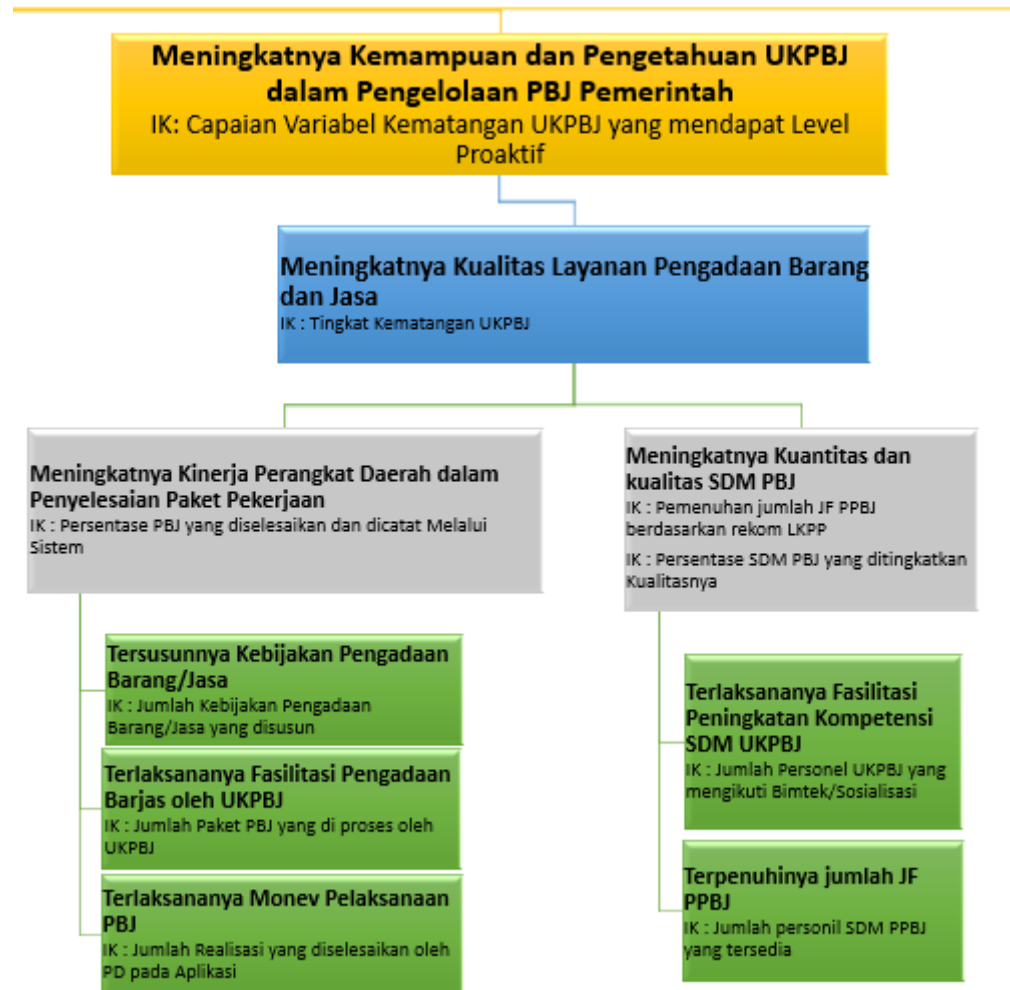
Terlaksananya Dokumentasi, Sosialisasi/Diseminasi Produk Hukum
IK: Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan
IK: Jumlah Peserta Sosialisasi/Diseminasi Produk Hukum

Meningkatnya Penyelesaian Perkara Hukum
IK: Persentase Masalah Hukum yang terselesaikan

Meningkatnya Fasilitasi Pendampingan Hukum
IK: Persentase Masalah Hukum yang ditindaklanjuti

Terinventarisirnya Pengaduan atas Masalah Hukum
IK: Jumlah Pengaduan Masalah Hukum yang diterima

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum
IK: Jumlah Masalah Hukum yang difasilitasi



Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
IK : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

